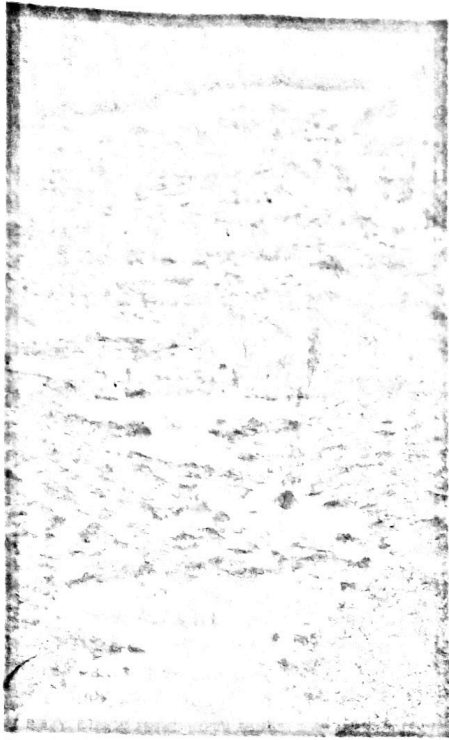


## Tak berani tertibkan Angkutan perusak Kadishub Mundur saja



**Pakuon Ratu RWK-** Masyarakat Kecamatan Pakuon Ratu, Negeri Besar dan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, kembali meminta pihak pihak yang berkompeten untuk menertibkan Armada Angkutan beberapa perusahaan besar di daerah tersebut yang dianggap merugikan masyarakat karena diduga selalu memabawa muatan jauh melebihi kapasitas jalan, yang menyebabkan jalan Nasional, Provinsi dan jalan Kabupaten yang ada ide 3 Kecamatan tersebut rusak nya semakin parah.

“Waktu itu saat kami tanyakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Way Kanan, ( Usman Karim red ), beliau mengatakana akan memberikan sangsi tegas melalui penertiban yang akan dilakukan bila perusahaan tidak mengindahkan Surat Edaran Bupati, nah kenyataannya sekarang truk truk angkutan itu sama sekali tidak mengindahkan surat edaran Bupati, mengapa tidak ditertibkan, ada apa ini, padahal kalau terus dibiarkan jalan ini akan semakin rusak dan kami rakyat kecil yang mera-

### PAKUAN...

sakannya,” ujar Ardim , warga setempat.

“Saya ingat Surat Edaran Bapak Bupati tentang Larangan Kendaraan Angkutan Melebihi Kafasitas Muatan pada Tanggal.29 Juli 2022 yang lalu ,tapi pelanggaran tentang muatan masih terus berlangsung hingga sekarang.

Padahal Surat Edaran itu juga telah di sampaikan kepada Pimpinan Perusahaan Swasta, BUMD dan BUMN, Pimpinan Perusa-

haan Angkutan, Camat dan Kepala Kampung / Lurah se Way Kanan tapi tidak dipatuhi.” Imbuh Ardim.

Hal itu juga di keluhkan oleh Gunawan, mantan Kepala Kampung Pakuon Ratu yang merasa sangat dirugikan atas aktipitas truk-truk angkutan yang membawa muatan melebihi tonase jalan tersebut, padahl seharusnya para pengguna jalan itu mematuhi Surat Edaran Bupati tentang Larangan Kendaraan Armada Melebi-

hi Kafasitas Muatan . dengan harapan agar jalan bisa bertahan lama dan dapat lebih lama dinikmati masyarakat.

” Banyak kendaraan yang bertonase lebih dari Surat Edaran Bupati melewati Jalan dari Negara Batin Dan Sekitarnya menuju perbatasan Lampung Utara, kami minta pihak terkait segera menertibkan, tegas Guawan, atau kalau perlu masyarakat yang akan melakukan pen-

ertiban, karena hal begini inilah yang menyebabkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, mirisnya kalau warga yang melakukan penertiban pasti langsung di tangkap, sementara yang salah seperti ini tetap bebas sekehendak hati,” tegas Gunawan.

“Dan bahkan saya liat di Medsos ada warga yang meminta Kadishub Way Kanan meletakkan jabatan kalau tidak berani menertibkan Angkutan yang mer-

usak ini , karena masalah ini urgensi sekali ,” imbuh Gunawan .

Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Way Kanan, Usman Karim S.Pd, MM, tidak menjawab Konfirmasi Radar, padahal dia sebelumnya pernahberjanji akan langsung melakukan penertiban saat SE tetap dilanggar oleh Perusahaan dan atau perseorangan. Andre

# Jembatan Rusak, Warga Kampung Jukubatu Terancam Terisolasi

**BLAMBANGANUMPU** - Warga Kampung Jukubatu, Kecamatan Banjit, Waykanan, saat ini mengalami kesulitan untuk pergi ke pasar maupun perkebunan. Sebab, jembatan gantung yang menjadi akses warga rusak parah sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Jembatan gantung yang terletak di Lubuk Pinang, Dusun 6, Simpang Rejang, Kampung Jukubatu, itu sekarang tidak bisa digunakan lagi karena sangat membahayakan penggunaannya. Walhasil, aktivitas warga jadi terganggu. Sedangkan menyeberangi sungai menggunakan perahu tidak mungkin karena aliran cukup deras di musim hujan.

kondisinya sangat memprihatinkan. "Sudah beberapa kali putus, dan warga secara bergotong royong memperbaikinya. Tapi sekarang kondisinya benar-benar parah dan warga tidak mampu lagi memperbaikinya, sekali lagi kami mohon bapak bupati dapat memperbaikinya," haranya.

Bila tak segera diperbaiki, perekonomian warga akan terganggu. Sebab warga tidak bisa mengeluarkan hasil perkebunannya. "Sekarang lagi musim kemarau jadi warga masih bisa menyeberangi sungai lewat bawah, tetapi kalau nanti musim hujan tiba, hal itu tidak dapat lagi dilakukan, selain airnya deras dan dalam bisa membahayakan

Terkait hal itu, Kepala kampung Juku Batu, M.A. Khoirin, menyatakan jembatan itu sebenarnya pernah diperbaiki, namun tidak bisa bertahan lama dan rusak lagi. Padahal jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses warga untuk membawa hasil perkebunan mereka. "Kami berharap Pemkab Waykanan bisa memperbaikinya. Karena yang tinggal di Dusun 6 Talangrejang itu hampir 200 KK. Kalau (dibangun) dari dana desa tidak mencukupi," ujar Khoirin.

Jembatan gantung tersebut dibangun sekitar tahun 2006 dan hingga kini belum pernah mendapatkan perawatan dari Pemkab Waykanan, sehingga

keselamatan warga," Imbuh Khoirin.

Sayangnya, Kepala Dinas Pekerjaam Umum Waykanan Edwin Bavur tidak dapat dikonfirmasi. Bahkan di kantor pun tidak ada. Demikian pula dengan sekretarisnya.

"Maaf Pak, kami enggak berani bicara. Kami sudah lama tidak melihat bos (Kadis PUPR) masuk kantor. Kalau dia perlu dengan kami, beliau telepon dan janji ketemu di mana. Kan sekarang sudah ada abensi siap kerja, jadi walaupun tidak ke kantor bisa saja dari rumah langsung melakukan pengawasan ke lapangan," ujar salah satu pegawai Dinas PUPR Waykanan. (sah/c1/nca)

Radar Lampung, Rabu 7 September 2022

# Tokoh Adat Waykanan Laporkan KLHK

**BLAMBANGANUMPU** - Rusli, perwakilan dari lima tokoh adat yang ada di Blambanganumpu, Waykanan, melaporkan peristiwa pembukaan hutan lindung Register 42 yang diduga dilakukan oleh PT Pra Mitra Mulya Langgeng (PML) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan juga ke KPK.

"Atas nama lima tokoh adat yang ada di Blambanganumpu, kami meminta pemantauan dan penindakan PT PML dan PT Inhutani Lampung di Waykanan, karena diduga tidak

pernah memenuhi kewajiban kepada negara mengenai pajak atas pengolahan tanah luas ribuan hektare menyangkut dana reboisasi dan alih fungsi lahan. Semua bukti sudah saya kirimkan ke kedua lembaga tersebut," ujar Rusli.

Tak hanya itu, pihaknya sudah menanyakan kepada pimpinan PT Inhutani V, apakah mitranya yakni PT PML berhak menanam tanaman injigo dan membuat pabrik pakan ternak di lahan yang dikuasai Inhutani. "Ternyata dijawab oleh pak Barnabas tidak boleh dan saya memiliki bukti

atas percakapan kami itu," imbuh Rusli.

Pada kesempatan itu pula, Rusli menerangkan bila dirinya pernah dipanggil oleh Polda Lampung terkait laporan dari pihak PML tentang dugaan penyerobotan lahan, yakni surat panggilan Nomor D/23/1/RES 1 2/2022 Ditreskrimum Polda Lampung, Perihal klarifikasi sebagai saksi terkait laporan polisi nomor LP/B/2257/XII/2021/SPKT/Polda Lampung pada 11 Desember 2021 yang dilaporkan atas nama Supriyadi. "Ketika ditanyakan

di Polda saya tegaskan warga sudah lebih dahulu mendapatkan izin tumpang sari di lokasi tersebut dari kementerian," jelasnya.

Penanaman injigo sebagai bahan pakan ternak di tengah areal Inhutani V register 42, kata Rusli menyalahi aturan. Padahal kata Rusli harus ditanam kayu.

Sayangnya, Arum dan Edi dua pimpinan PML yang dikonfirmasi melalui telepon genggam keduanya tidak merespons. Bahkan Komisaris PT PML Edi juga tak merespons. **(sah/cl/nca)**

Radar Way kanan, Senin 12 September 2022

## 4 tahun Mangkrak, Kasus Gusur Lahan yang diduga dilakukan Oknum Anggota Dewan Way Kanan Mulai disidik

**Blambangan Umpu RWK**  
.- Mengetahui loprannya atas dugaan pengrusakan lahan milik 22 orang warga Kampung Negara Mulya Kecamatan Negara Batin yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota DPRD Way kanan, statusnya di naikkan ke proses sidik, Anton Heri SH, dan YLBH 98, selaku penasehat Hukum ke 22 orang petani kampung Negara Mulya, menyambut positif dan berharap perkara itu segera berjalan cepat tidak lagi jalan ditempat.

“Kami selaku Penasehat Hukum 22 petani kampung Negara

keprofesionalan Polda Lampung, ingat dalam penegakan hukum tidak boleh ada disparitas, sebab jika pihak penyidik polda tidak segera merampungkan laporan ini dengan cepat dan menghadiahi terlapor status tersangka, maka akan jadi preseden buruk bagi Polda Lampung secara keseluruhan” imbuah Anton.

Lebih jauh menurut Antan, seperti yang kita ketahui bersama perhari ini, citra polri sedang tidak baik-baik saja, nah jika pak Wiyagus tidak mau Polda Lampung dicap negatif dihadapan warga Lampung maka ini moment yang sangat

laporkan sebagai pengrusakan lahan oleh k e22 Petani Kampung Negara

pengelola saja

‘ Tidak ada Komentar Bang kita Cuma pengelola

lahan dan bukan pemilik,; pendek jawaban Anggota DPRD Way kanan tersebut,

Mulya tentunya menyambut positif atas dinaikan keproses sidik, dengan harapan perkara ini segera jalan cepat tidak lagi jalan ditempat seperti semula dan apa lagi sampai berhenti ditahap sidik, mengingat proses yang sudah kian lama kami jalani mulai LP Agustus 2019 sampai hari ini 2022 artinya proses penegakan hukum ditingkat kepolisian tergolong lama (lamban)”, ujar Anton Heri SH.

“Jangan sampai rumor yang beredar dipublik karena terlapor adalah anggota DPRD yang terhormat sehingga dapat mempengaruhi

tepat untuk membuktikan bahwa polisi Lampung taat asas hukum dan sangat profesional.

Diterangkan, melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pengembangan Penyelidikan ( SP2HP), Nomor SP2HP/595/VIII/RES 1.2/2022/ Ditreskrim dinyatakan laporan tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan, dan hal itu dibenarkan oleh Dirkrimum Polda Lampung Kombes Pol Reynold E Hutagalung,

Sementara Doni A Ira yang dil-

Mulya menyatakan tidak memiliki Komentar karena bukan pemilik dan hanya

saat dikonfirmasi, terkait permasalahan yang sedang dihadapi, RWK I

Radar Lampung, Selasa 13 September 2022

## Lapor Pak! Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET

**BLAMBANGANUMPU-** Meski peraturan ketat yang dibuat pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk subsidi, ternyata tidak berlaku di Waykanan. Sebab, kios-kios penjual pupuk subsidi masih menjualnya di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan.

Bahkan khusus untuk pupuk jenis Ponska serta SP 36 dijual dengan harga Rp165 ribu hingga Rp180 ribu per sak, atau terdapat selisih hingga Rp60 ribu per sak. "Semua itu adalah hasil penelusuran yang kami lakukan langsung ke petani. Kios pupuk yang ada di Waykanan dari Kecamatan Negeribesar hingga Bumiagung kami temui menjual jauh di atas HET," ujar sumber *Radar Lampung*.

Padahal, lanjut dia, untuk penjualan pupuk urea sesuai HET semestinya harga yang sampai ke tingkat petani Rp112 ribu per sak ukuran 50 kilogram (kg). Ponska Rp115 ribu, dan SP 36 Rp120 ribu per sak. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2010. Di mana regulasi itu harus diawasi oleh *stakeholder*

dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Pendistribusian pupuk dari produsen hingga ke kios itu sudah terdaftar masing-masing memiliki SPJB (surat perjanjian jual beli) yang di dalamnya sudah tercantum untuk menjual sesuai dengan HET. Karena pendistribusian pupuk tersebut pembiayaannya sudah ditanggung oleh pemerintah," ungkapnya. Tetapi nyatanya hal itu diduga diingkari oleh distributor dengan kios karena terbukti mereka masih menjual ketiga jenis pupuk subsidi tersebut jauh di atas HET.

Terpisah, Minar, salah satu penjual pupuk di Kampung Saiumpu, Kecamatan Waytuba, saat dikonfirmasi menyatakan menjual pupuk seharga Rp185 ribu per sak untuk jenis ponska. Namun ia mengakui tidak memiliki toko pupuk, melainkan membeli dengan orang lain sehingga ia menjual dengan harga tersebut kepada warga yang menginginkan.

Kepala Dinas Pertanian Holtikultura dan Peternakan Waykanan Maulana Muhidan menyatakan akan menindak lanjuti temuan tersebut. (sah/cl/nca)

# Setop Gunakan Peledak di Tambang Batu

*Warga juga sudah memberikan surat peringatan keberatan ke perusahaan tambang batu tersebut lima bulan lalu, namun tidak ada respons dari pihak perusahaan.*

**ANDI APRIADI**

andi@lampungpost.co.id

**W**ARGA Kampung Gunungpekuwon dan Way Tuba, Kecamatan Gununglabuhan, Way Kanan, meminta aktivitas perusahaan tambang batu yang menggunakan bahan peledak di Desa Campangjaya, Kecamatan Sungkai, Lampung, dihentikan.

Kepala Kampung Way Tuba, Rusman, mengatakan hingga saat ini tiga perusahaan pertambangan, yakni PT Wahana Mitra Perdana Lampung, PT Adi Sejahtera dan CV Num Num Sai (661), terus melakukan aktivitas peledakan yang membuat warga resah dan terganggu.

"Kami hanya minta dihentikan. Walaupun bahan peledak seperti dinamit *dikurangi*, tetap suara ledakannya sampai ke permukiman warga," kata dia kepada *Lampung Post*, Rabu (26/10).

Rusman menuturkan selama ini belum ada sosialisasi dari pihak

perusahaan tambang batu itu kepadanya dan warga sekitar.

"Sampai sekarang belum ada pembicaraan dengan warga kampung. Sementara warga sudah resah dengan aktivitas tambang batu itu pakai peledak. Karena dampak getaran dan suara ledakannya sampai ke permukiman," ujar dia.

Dia juga mengaku sudah memberikan surat peringatan keberatan ke perusahaan tambang batu tersebut lima bulan lalu. Namun, tidak ada respons dari pihak perusahaan, sehingga membuat warga geram.

"Saya juga sebagai kepala kampung sudah banyak menghalangi warga yang ingin mendatangi tambang batu itu. Sebab, saya tidak ingin ada keributan," katanya.

Lantaran tidak ada respons dari pihak perusahaan, ia bersama kepala Kampung Gunungpekuwon akan melaporkan ke pihak kepolisian setempat.

"Kami akan melaporkan ke kepoli-

sian jika tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan ini," ujarnya yang diamini Kepala Kampung Gunungpekuwon, Deddy.

## Pemkab Turun

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Lampung Irfan Tri Musri meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan bersama Dinas Lingkungan Hidup setempat turun melihat langsung dampak penggunaan bahan peledak tersebut.

"Karena penggunaan bahan peledak bukan hanya berbicara dampak. Sebab, dampaknya banyak, seperti menimbulkan getaran, lontaran batu sampai ke kebun tempat warga sedang beraktivitas. Jadi Pemkab maupun dinas terkait harus turun," kata dia.

Menurut Irfan, administrasi dan perizinan penggunaan bahan peledak ini juga harus dicek apakah sudah memiliki persetujuan dari warga dan kepolisian. "Karena penggunaan peledak wajib memiliki izin dari kepolisian serta warga sekitar," ujar dia.

Dia menilai ada yang salah dalam proses penggalan batu menggunakan peledak di tambang batu tersebut, lantaran warga mempersoalkan dampaknya. (D2)

Radar Lampung, Rabu 9 November 2022

WAYKANAN

## Kasus Temuan Pupuk Tuai Sorotan

**TEMUAN** puluhan ton pupuk subsidi di sebuah bangunan bekas asrama ponpes di Kampung Kertajaya, Kecamatan Negerabatin, yang kini diusut oleh Polres Waykanan mendapat perhatian serius dari DPRD Lampung.

Yozi Rizal selaku anggota DPRD Lampung dapil 5, termasuk Waykanan, ini meminta penegak hukum serius menanganinya. Bahkan, ia meminta agar segera ada penetapan tersangka.

Hal itu untuk menunjukkan kepada masyarakat kalau memang tidak ada keterlibatan oknum dan profesional. "Kan sudah ada bukti permulaan yang cukup, maka sudah sepatutnya aparat penegak hukum menaikkan status penyidikan dan menetapkan siapa tersangkanya," ungkap Ketua Komisi I DPRD Lampung ini

Terpisah, Saptari LSM Elemen Masyarakat Penggiat Pembangunan RI (EMPPATI) juga mempertanyakan lambannya kasus tersebut ditangani. Terlebih perkara itu sudah terang lantaran pemilik pupuk sudah diketahui.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Waykanan AKP Andre Try Putra mengatakan kasus itu masih terus berjalan. "Tetap jalan kok, tapi biar jelas coba konfirmasi langsung ke Kanit Tipiter ya," tandasnya. (sah/c1/nca)

# Blambanganumpu Optimalkan Penurunan Stunting

**MOMENTUM, Blambanganumpu-**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Waykanan bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Blambanganumpu menggelar lokakarya mini, Selasa (6-12-2022).

Lokakarya yang berlangsung di aula Kantor Kecamatan Blambanganumpu itu membahas optimalisasi dan efektifitas upaya percepatan penurunan dan penanganan stunting (gangguan pertumbuhan tubuh anak akibat kekurangan gizi) di wilayah setempat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Waykanan Indera Kesuma, peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan upaya penurunan stunting.

"TPPS harus mampu melaksanakan fungsinya meningkatkan peran aktif masyarakat untuk percepatan penurunan stunting. Lewat lokakarya ini, kita berupaya merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif untuk percepatan penurunan stunting, khususnya di wilayah Kecamatan Blambanganumpu," kata Indera.

Hal senada disampaikan Camat Blambanganumpu Achmad Syapari. Dai berharap, lokakarya tersebut dapat memperkuat sinergi dan koordinasi pihak-pihak terkait untuk lebih mengoptimalkan upaya percepatan penurunan stunting.

"Cakupan dan sasaran upaya penurunan stunting cukup banyak. Mulai dari remaja, pasangan calon pengantin, ibu hami, pasca melahirkan sampai kepada tugas pendampingan terhadap keluarga. Semua harus lebih disinergikan untuk percepatan upaya penurunan stunting," kata Achmad Syapari. (vit)

website : [www.harianmomentum.com](http://www.harianmomentum.com)



Lokakarya mini membahas upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan Blambanganumpu, Kabupaten Waykanan

Foto: VIta